



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARTININGSIH
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN FILSAFAT BARAT
3. NHK : 805044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	220.454.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m ² /45 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 136.224.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m ² /54 m ² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 84.230.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	224.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 64.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA GEAR 125 S Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000		
5. MOTOR, HONDA BEAT 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000		
6. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.798.835



F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	569.552.835
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	569.552.835

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.